

MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM MODERASI BERAGAMA DI ERA DISRUPSI DIGITAL

Kadek Hengki Primayana¹, Putu Yulia Angga Dewi²
STAHN Mpu Kuturan Singaraja¹²
hengkiprimayana@gmail.com¹, anggadewiyulia@gmail.com²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 23 Juni 2021
Artikel direvisi : 28 Juni 2021
Artikel disetujui : 30 Juni 2021

Abstrak

Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam team dan sebuah penerapannya manajemen memiliki subyek dan obyek. Pendidikan merupakan sebagai usaha belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pendidikan, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Begitu pun dengan tenaga kependidikan mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Kata kunci: *manajemen pendidikan, moderasi beragama, dan disrupsi digital*

Abstract

Management is a process carried out to achieve an organization's goals by working in teams and an application of management has a subject and an object. Education is a learning effort and learning process for students to actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed by themselves and society. Educators and education personnel in the educational process play a strategic role, especially in efforts to shape the character of the nation through the development of the desired personality and values. Viewed from the educational dimension, the role of educators in Indonesian society remains dominant even though the technology that can be utilized in the learning process is developing very quickly. Likewise, their education staff is tasked with carrying out administration,

management, development, supervision and technical services to support the educational process in educational units.

Key Words: *Education Management, Religious Moderation, And Digital Disruption*

I. PENDAHULUAN

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam bentuk kesiapan mengikuti semua petunjukNya. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghambakan diri pada yang lain, juga tidak diperhambakan oleh manusia lain. Di sinilah terlihat jelas esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir, manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi.

Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tahun 2019 sebagai “Tahun Moderasi Beragama”. Moderasi beragama dijadikan jargon serta nafas dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, institusi ini berupaya untuk menempatkan diri sebagai institusi penengah (moderasi) di tengah keragaman dan tekanan arus disrupsi yang berdampak pada aspek kehidupan keagamaan dan kebangsaan.

Moderasi beragama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas. Moderasi beragama didiskusikan, dilafalkan, diejewantahkan, dan digaungkan sebagai *framing* dalam mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Kebutuhan terhadap narasi keagamaan yang moderat tidak hanya menjadi kebutuhan personal atau kelembagaan, melainkan secara umum bagi warga dunia, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dalam menghadapi kapitalisme global dan politik percepatan yang disebut dengan era digital.

Di dalam ruang digital yang dikendalikan oleh kecepatan elektronik, eksistensi manusia mengalami perubahan mendasar dari sebuah bentuk tubuh yang bergerak di dalam ruang, menjadi se bentuk tubuh yang diam di tempat dan hanya mampu menyerap setiap informasi yang lewat melalui simulasi elektronik. Ruang digital kemudian menjadi arena kontestasi dan kompetisi. Pada titik inilah, ruang-ruang digital dimanfaatkan oleh kelompok

tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas. Ruang digital itu kini lebih condong didominasi nilai keagamaan yang menjurus kepada eksklusivitas. Tidak hanya itu, ajaran-ajaran agama dipertentangkan dengan kebijakan-kebijakan negara. Kondisi demikian sangat mengkhawatirkan karena dapat menggeser otoritas keagamaan serta menumbuhkan peremajaan. Bagaimana tidak, otoritas keagamaan tidak lagi dipegang secara otoritatif dan kredibel.

Dalam teori *Religious-Social Shaping of Technology* yang diperkenalkan oleh Heidi Campbell dalam bukunya *When Religion Meets New Media* (2010), dijelaskan bahwa dampak era digital terhadap cara beragama masyarakat, di antaranya yang paling terasa adalah pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme.

Sementara narasi dan kajian keagamaan merupakan arena kompetitif yang memiliki potensi besar untuk diproduksi oleh kelompok tertentu guna menyebarluaskan ide, gagasan, dan simbol keagamaan kepada publik. Kajian keagamaan menjadi arena basah yang mudah dimainkan dan dinarasikan sesuai dengan keinginan subyektif semata. Kondisi demikian disadari bahwa masyarakat beragama saat ini sebatas pada simbol dan masih jauh dari nilai-nilai substansial.

Disisi lain, menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi Manajemen tenaga pendidik dan pendidikan merupakan aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendik dan kependidikan masuk kedalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian.

Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam team dan sebuah penerapannya manajemen memiliki subyek dan obyek. Pendidikan merupakan sebagai usaha belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.

Dipandang dari dimensi pendidikan, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Begitu pun dengan tenaga kependidikan mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sehubungan dengan tuntutan kearah profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, maka semakin dirasakannya desakan untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana mengelola pendidik dan tenaga kependidikan.

Era revolusi industry 4.0 merupakan era rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan konektifitas manusia dan mesin. Era ini membawa dampak bagi perkembangan masyarakat. Masyarakat yang akan dan sedang dituju tersebut disebut masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berbasis teknologi dimana data-data terkompilasi di dunia maya yang dapat digunakan dalam segala bidang kehidupan (Arief Budiman, 2019).

Era ini membawa dampak secara luas dan mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Dimana manusia yang dulunya melakukan aktifitas di dunia nyata, namun oleh karena perkembangan teknologi akhirnya menggeser aktifitas nyata tersebut menjadi aktifitas dalam dunia maya. Dari aktifitas di dunia maya tersebut, manusia tidak hanya

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang, tetapi juga dapat mengenali, mengantisipasi dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang.

Praseto (2019) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 menyebabkan disrupsi pada berbagai bidang mulai pada bidang bisnis kemudian juga meluas pada bidang-bidang yang lain, diantaranya pendidikan, pemerintahan, hukum, budaya, politik, dan sosial.

Pada dasarnya nilai sosial yang dianut dalam masyarakat terpengaruh dari budaya dan keyakinan yang dianut dalam masyarakat di suatu wilayah tersebut. Dengan demikian bidang keagamaanpun dalam implementasi pelaksanaan peribadatan turut terdisrupsi oleh perkembangan teknologi zaman. Hal ini memungkinkan terjadinya kemerosotan nasionalisme. Nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembangunan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, bisa saja tergerus oleh kemajuan teknologi. Karena teknologi bebas memberi pengetahuan dan tayangan melalui bidang penyiaran nilai-nilai radikalisme. Lalu bagaimana insitusi keagamaan menyikapinya.

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut dilakukan, dengan mengumpulkan data-data yang bersifat primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi secara empirik dan juga secara teoritik.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kultur Moderasi Agama

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi ber- agama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekanatau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan.Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan.

Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi teladan. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berbagai ritual budaya yang berakar pada tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal juga banyak dilestarikan, demi menjaga harmoni dan keseimbangan.

Peran negara dalam menjaga keseimbangan ini amat penting, karena akan sangat menentukan terciptanya moderasi, yang salah satu pilarnya adalah keadilan. Bangsa Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk secara agama dan memiliki jumlah penduduk sangat besar. Dengan merujuk pada Sensus Penduduk 2010 yang merupakan sensus terakhir, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. Berdasarkan hasil sensus tersebut, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen) penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Kemudian secara berturut-turut diikuti oleh penganut agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96 persen), penganut agama Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91 persen), penganut Hindu sebanyak 4 juta jiwa (1,69 persen), penganut Buddha sebanyak 1,7 juta jiwa (0,72 persen), penganut Khonghucu sebanyak 0,11 juta jiwa (0,05 persen), dan agama lainnya 0,13 persen (Sensus Penduduk 2010, BPS).

Kemajemukan pada tingkat agama ini masih ditambah lagi dengan kemajemukan pada wilayah tafsir agama, sehingga tidak mengherankan jika banyak mazhab, sekte, atau aliran dalam setiap agama. Semua ini akibat perbedaan kapasitas dan kemampuan berpikir masing-masing orang, perspektif, ataupun pendekatan. Selain itu, teks-teks keagamaan dalam satu agama memang bersifat terbuka terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan. Kemajemukan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan, agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan bersolidaritas. Namun demikian, kema-

jemukan pada tingkat agama dan internal agama tersebut harus diakui potensial bagi terjadinya konflik berlatar isu keagamaan. Dalam konteks Indonesia yang multi agama di mana masing-masing agama mengajarkan bahwa dirinya lah yang paling benar, sedangkan yang lain salah, maka konflik yang mengatas namakan agama di Indonesia tergolong permasalahan yang rawan terjadi.

Luc Reyhler (2006: 7) mengemukakan teori Arsitektur Perdamaian yang menyebutkan, dalam pengelolaan perbe- daan agama dibutuhkan sejumlah syarat yaitu; Pertama, ada- nya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial; Kedua, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama; Ketiga, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumberdaya dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi masa oleh tokoh pro-konflik; Keempat, struktur sosial-politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat; dan Kelima, struktur sosial-politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial.

2.2 Konteks Masyarakat Multikultural

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam menyusun norma - norma sosial kemasyarakatan. Agama di satu sisi menuntut penganutnya untuk bersikap eksklusif. Tapi pada sisi lain, agama juga mengajarkan sikap inklusif atau terbuka. Agama hadir dalam upaya menjaga, melindungi hak hidup masyarakat, serta untuk melindungi hajat hidup manusia. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila lainnya.

Oleh sebab itu, pembangunan bidang agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang untuk periode 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil,

dan Makmur.”Ditinjau dari sudut pandang setiap agama yang ada di Indonesia, Pancasila memang seirama dan selaras dengan tujuan diturunkannya ajaran agama. Hal itu tercermin dalam sila pertama yang di dalamnya menyimpan semangat untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*common good*) dengan bertumpu pada nilai agama, sila kedua menegaskan perlindungan nyawa yang merupakan hal mendasar bagi manusia, dalam sila ketiga ada jaminan untuk keturunan, sila keempat adalah cerminan dari perlindungan terhadap akal/kebijaksanaan dan sila kelima jaminan untuk pengamanan harta.

Moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi, atau toleran. Dari moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) jika moderasi diterapkan. Kata toleransi bisa diartikan kelapangan dada, dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan lain. Toleransi dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda, toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing. Hakikat toleransi terhadap agama-agama lain merupakan satu prasyarat yang utama bagi terwujudnya kerukunan nasional. Sementara itu kerukunan nasional merupakan pilar bagi terwujudnya pembangunan nasional. Melalui sikap toleran dan saling menghargai secara substantif antar pemeluk agama, maka akan terwujud interaksi dan kesepahaman yang baik di kalangan masyarakat beragama sehingga bisa terwujud tatakehidupan yang aman, tenteram dan rukun.

Indonesia pernah mengalami berbagai konflik kekerasan sosial keagamaan, konflik-konflik tersebut berakibat pada kerugian yang tak ternilai, baik harta benda maupun jiwa. Banyak rumah ibadah, rumah-rumah, bahkan fasilitas sosial dirusak, dibakar atau dihancurkan, hingga korban jiwa yang tidak sedikit. Peristiwa kekerasan tersebut sering terjadi dan banyak diberitakan media, baik media cetak maupun elektronik. Para pelaku yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut nampaknya belum menyadari bahwa kebinekaan atau keragaman itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri sehingga perlu dikelola secara baik. Peristiwa-peristiwa konflik kekerasan tersebut sejatinya tidak menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena secara

historis bangsa Indonesia yang majemuk ini selama berabad-abad telah mempraktikkan prinsip hidup bersama yang harmonis. Sejak wilayah nusantara ini belum dapat disebut sebagai negara secara politik, bangsa Indonesia telah memegang teguh semboyan “bhinneka tunggal ika” yang berarti beragam tapi satu.

Kebinekaan hanya bisa bertahan lama manakala kita dapat mengembangkan kultur toleransi yang sejati, bukan toleransi karena terpaksa atau toleransi yang dibungkus ke pura-puraan. Toleransi sejati yang dimaksud di sini adalah toleransi yang tidak pasif dengan sekadar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, namun juga aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan sosial budaya. Bangsa Indonesia harus mampu memelihara kebhinekaan melalui sikap toleransi aktif tersebut. Tanpanya, bangsa dengan banyak ragam keyakinan dan ratusan jenis suku atau etnis ini dapat hancur karena pertikaian.

Upaya membangun kerukunan bukan hal yang sederhana, dibutuhkan kebijakan, strategi, dan beragam pendekatan baik yang bersifat sosiologis maupun teologis. Untuk itu membangun kerukunan dalam masyarakat membutuhkan modal sosial. Banyak ahli telah menjelaskan modal sosial yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan situasi damai. Sebagian menyebut bahwa semakin kuat jaringan kewargaan dalam sebuah masyarakat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan komunal antar warga. Jaringan keterlibatan warga yang mampu menumbuhkan sikap saling percaya antar sesama warga ini adalah modal sosial yang berharga. Semakin kuat jaringan kewargaan dalam masyarakat, semakin besar kemungkinan bagi warganya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, termasuk koordinasi dalam meredam potensi konflik.

Demikianlah, toleransi aktif dari para pemeluk agama sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial. Upaya membangun kerukunan antar pemeluk agama tidak bisa hanya dengan memandang perbedaan sebagai fakta sosial yang fragmentatif, namun juga perlu adanya keterlibatan aktif, yaitu bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan melalui interaksi sosial yang intens, guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan sesuai yang dicita-citakan.

2.3 Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital

Kompleksitas kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan dan perubahan yang sangat ekstrem berbeda dengan masa-masa sebelumnya karena dunia sekarang tengah memasuki era disrupsi, sehingga dalam kehidupan keagamaan pun kita bisa menyebut adanya disrupsi beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata disrupsi didefinisikan sebagai “hal tercerabut dari akarnya”. Biasanya, disrupsi dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang kini memasuki revolusi industri digital 4.0. Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang kehidupan keagamaan. Istilah disruptive technology ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan suatu perubahan radikal yang sangat cepat dan mengakibatkan efekdomino yang luar biasa masif, termasuk dalam perilaku beragama. Internet juga mengubah pola perilaku beragama.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital ini sedemikian berpengaruh terhadap perilaku sosial, termasuk perilaku beragama. Hal ini disebabkan media digital ini bersifat membangun jejaring, tidak memihak, inter-aktif melibatkan peran aktif manusia, dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Kemudahan akses internet yang tidak memiliki aturan baku ini layaknya pasar bebas, siapa saja dapat menuliskan informasi apapun bahkan catatan pribadi pun bisa dipublikasikan dan menjadi konsumsi secara luas. Bahkan, keberlimpahan sumber informasi ini juga telah menjadi media belajar yang kian digemari oleh generasi Z.

Masalahnya, meskipun konten di media sosial lebih mudah diakses dan disajikan dalam bentuk yang menarik, namun informasi benar dan salah kian campur aduk tak terkendali. Ini berdampak serius ketika menyangkut konten agama, apalagi hal ini juga didukung oleh perubahan sikap masyarakat yang serba instan. Budaya instan dan praktis yang tercipta dari revolusi digital ini membuat masyarakat cenderung lebih menyukai berita melalui sosial media dibanding media masa.

Hoaks dapat didefinisikan sebagai kebohongan yang terencana untuk mengecoh dan menipu orang lain. Hoak sangat berbahaya jika sampai mencelakakan, apalagi jika hoaks itu menggunakan topeng agama, maka ia dapat menciptakan konflik dan peperangan

penyakit militansi, karena watak agama yang sangat menyentuh sisi emosional setiap manusia. Hoaks juga akan sangat destruktif jika disampaikan oleh orang yang mengaku pengkhotbah agama, karena niscaya kata-katanya didengar oleh umatnya. Ia dapat mereduksi nilai mulia agama. Menimbang dampak jahatnya, hoaks dapat dianggap lebih keji dari pembunuhan (Komaruddin Hidayat, “Hoaks dan Agama”, Kompas, 8/1/2019). Demikianlah, perkembangan teknologi membuat tempat belajar berganti, terutama pada masyarakat yang sudah akrab dengan teknologi. Kalau dulu belajar agama pada kiai di pesantren, saat ini ada “kiai Google”. Umat digital menjadi terbiasa menemukan kebenaran tunggal, tanpa penjelasan dan pengayaan. Menghadapi umat digital dengan karakteristik seperti ini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan framing, apalagi masyarakat Indonesia sangat plural dan multikultural.

Sayangnya, pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan agama, baik dari kalangan agamawan maupun akademisi, dalam era disrupsi ini dirasakan kurang hadir mengisi dahaga keberagamaan publik lewat ruang-ruang media sosial, padahal sejatinya mereka memiliki pengetahuan mendalam dan sangat mampu menghadirkan nilai-nilai luhur moral dan spiritual agama. Di era ini, pengembangan literasi keagamaan yang mengandung muatan ajaran moderat sangat mendesak dilakukan untuk mengimbangi konservatisme berbasis media sosial. Faktor-faktor yang dapat menyumbang tumbuh suburnya pemahaman keagamaan yang sempit semakin kompleks, bukan saja muncul dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau pelajaran di sekolah, melainkan juga yang tak terbandung adalah dari informasi yang tersedia di internet. Karenanya, di era yang dikenal dengan era disrupsi atau perubahan ini, setiap orang perlu memikirkan kembali praktik beragama yang selama ini dianutnya. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi habitus lama tertantang oleh adanya kebiasaan-kebiasaan baru sehingga kehilangan lagi relevansinya untuk era sekarang.

Budaya sekolah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh guru-guru dan para karyawan yang ada dalam sekolah tersebut. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada dalam sekolah/sekolah. Pertemuan pikiran-pikiran manusia tersebut kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan “pikiran organisasi”. Dari pikiran organisasi itulah kemudian muncul

dalam bentuk nilai-nilai tersebut akan menjadi bahan utama pembentuk budaya sekolah/sekolah. Dari budaya tersebut kemudian muncul dalam berbagai simbol dan tindakan yang kasat indra yang dapat diamati dan dirasakan dalam kehidupan sekolah/sekolahsehari-hari. Nilai-nilai dan keyakinan tidak akan hadir dalam waktu singkat. Mengingat pentingnya sistem nilai yang diinginkan untuk perbaikan sekolah, maka langkah-langkah kegiatan yang jelas perlu disusun untuk membentuk budaya sekolah. Segenap warga sekolah perlu memiliki wawasan bahwa ada unsur kultur yang bersifat positif, negatif, netral. Dalam kaitannya dengan visi dan misi sekolah mengangkat persoalan mutu, moral, dan multikultural; sekolah harus mengenali aspek-aspek kultural yang cocok dan menguntungkan, aspek-aspek yang cenderung melemahkan dan merugikan, serta aspek-aspek lain yang cenderung netral dan tak terkait dengan visi dan misi sekolah.

Pendidikan bukanlah sesuatu yang sederhana. Banyak aspek yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan program pendidikan. Tidak hanya aspek yang ada di madrasah saja, melainkan juga lingkungan yang ada di sekitar madrasah. Semua keadaan, situasi, sarana, fasilitas, SDM, dan semua yang ada di madrasah turut memberikan kontribusi bagi kelancaran dan keberhasilan program pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan. Secara normatif, pada prinsipnya tidak ada satu pun ajaran agama yang mendorong dan menganjurkan pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan dan kerusuhan terhadap pemeluk agama lain di luar kelompoknya. Sejumlah diskursus menunjukkan bahwa beberapa persoalan kebangsaan tersebut, lahir karena lemahnya kesadaran dan penghargaan atas perbedaan yang ada dan sikap keberagamaan yang menyimpang.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa munculnya sikap keberagamaan yang menyimpang semacam ini kemudian melahirkan sikap teror, untuk sebagian adalah cermin ketidakberdayaan sistem pendidikan di negeri ini, khususnya pendidikan agama. Ketidakberdayaan sistem pendidikan agama di Indonesia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita secara keseluruhan, tampaknya disebabkan oleh pendidikan agama selama ini lebih menekankan pada proses transformasi ilmu agama kepada anak didik, bukan pada proses transformasi nilai-nilai luhur keagamaan kepada anak didik untuk

membimbingnya agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan beakhlak mulia sehingga tidak ada yang salah pada pola dan keyakinan keberagamaan.

Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan suatu organisasi dengan cara bekerja dalam team dan sebuah penerapannya manajemen memiliki subyek dan obyek. Pendidikan merupakan sebagai usaha belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.

Dipandang dari dimensi pendidikan, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Begitu pun dengan tenaga kependidikan mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sehubungan dengan tuntutan kearah profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, maka semakin dirasakannya desakan untuk peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana mengelola pendidik dan tenaga kependidikan.

III. Simpulan

Kebutuhan masyarakat akan pemahaman agama yang baik dan benar juga dibutuhkan pada era disrupsi sekarang ini (atau dikenal juga dengan revolusi industri 4.0). Karena agama menempati posisi dan peran kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multi agama, pelaksanaannya dalam kehidupan publik harus taat pada dasar negara dan konstitusi. Akhir-akhir ini, kehidupan beragama di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa semakin menguatnya sikap eksklusivisme dan ekstremisme beragama.

Fenomena ini menggejala diberbagai ruang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Era disrupsi membawa perubahan dalam kehidupan beragama diIndonesia. Ekses dari era disrupsi telah menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi media pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan. Anak muda milenial tidak lagi belajar agama kepada para tokoh agama yang ahli di bidang kepakaran masing- masing, tapi malah belajar kepada internet, bertanya pada situs berbasis online/digital yang boleh jadi admin nya tidak mempunyai otoritas keilmuan agama yang tepat, berselancar menelusuri tafsir-tafsir keagamaan melalui mesin pencari google. Kalau ini dibiarkan terus maka akan menjadi ancaman bagi otoritas keagamaan tradisional. Karenanya perlu mengembangkan strategi komunikasi kepada generasi milenial agar mereka terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dan membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif.

Diperlukan langkah-langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh agama, budayawan, dan akademisi, menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda milenial tanpa kehilangan bobot isinya. Mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan literasi keagamaan (*religius literacy*) di kalangan milenial agar mereka melek agama yang semuanya bertujuan dalam rangka penguatan keberagamaan yang moderat. Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, yang mudah diakses untuk semua kalangan. Jika tidak direspon, era disrupsi akan mengakibatkan efek domino merusak tatanan kehidupan keagamaan.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI. 2019. *Mozaik Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hefner, Robert W. 2014. "Negara Mengelola Keragaman: Ka Jian Mengenai Kebebasan Beragama Di Indonesia" Dalam Robert W. Hefner Dan Ihsan Ali-Fauzi (Eds), *Mengelola Keragaman Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia: Sejarah, Teori Dan Advokasi*. Program Studi Agama Dan Lintas Budaya (*Center For Religius And CrossCultural Studies/ CRCs*) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

- Kamali, Mohammad Hasyim, 2015. *The middle Path of Moderation In Islam, The Qur'anic Principle Of Wasathiyah*. Oxford: Oxford University press.
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2016. "Meneguhkan Komitmen Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama". Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama.
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan, 2017. Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama